

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ahmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Fauzi Ridwan. *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Jakarta: Dewaruci Press.
- Asri Agustiwi. 2014. *Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia*,
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri.1988. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, Bandung: Tarsito
- Boedi Haarsono. 2002. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dan Hubungan Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria di Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya)*. Djamban, Jakarta: Djamban.
- Fence M Wantu. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H.Zulfikaer Achmad. 2008. *Belajar Dari Bungo (Mengelola sumber daya alam daerah desentralisasi)*, Bogor: Civor. 2008

Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Atas Tanah (Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang, Yogyakarta: Press Indo.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

J.G Klassen dan J.E Eggens. 2009 *Hukum waris Bagian 1*, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Presfektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas

Maya Indah. 2014. *Perlindungan Hukum Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana.

R. Roestandi Ardiwilaga. 1962. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Masa Baru.

Rahmat Ramdhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Prima.

Satjipto Raharjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Cet I*, Jakarta: Buku Kompas.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1999. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekonto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakart: Rajawali Pres.

Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Udin Narsudin. 2016. *Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Plurasisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)*, Gaung Persada, Ciputat.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Kencana Semarang: Prenada Media Group.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss

Artikel Dan Jurnal

Abdul Muthalib. 2020 *Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 12.

Adinda Zoraya Putri. 2016. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus*

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.), Jurnal Verstek, Volume 4, Nomor 3

Ahmad Supandi Patampari. 2016. *Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 2.

Alya Hapsari Nuraini. 2019. Liza Priandhini, dan Widodo Suryadono, *Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI*, Indonesia Notary, Vol. 1, No. 002

Aries Muzaijanah. 2007 *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat Di Kecamatan Purwekerto Selatan Kota Purwekerto*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Darwin Ginting. 2012. *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-42 No. 1

Eko Hariyanti. 2015. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya*, Tesis Magister Kenotaritan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Emmy Solina. 2019. *Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Permukiman Di Atas Air*, Jurnal Selat, Volume 7, Nomor 1.

Harris Yonata Parmahan Sibuea. 2011. *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali*, Jurnal Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2.

- Hayatul Ismi. 2012. *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1.
- Ida Nurlida. 2016. *Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Indera Sakti. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan*, Jurnal Privat Law.
- Kaludius Ikan Hulu. 2021. *Kekuatan Alat Bukti Seritifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No.1.
- Mireille Titisari Miarti Prastuti. 2006. *Peran Dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (Teastement Acte) Yang Dibuat Dihadapannya*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muhamma Syaifullah. 2020. *et.al.,Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2.
- Muliana dan Akhmad Khisni. 2017. *Akibat Akta Hukum yang Melanggar Hak Mutlak Ahli (Legitime Portie)* 4, Jurnal Akta.
- Ramli Usman, Ilyas Ismail, dan Azhari. 2016. *Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 4, Nomor. 3

Wahyu Azikin. 2018. *Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam*, Meraja Journal, Volume 1, Nomor 3.

Yanuar Suraydini dan Alifana Tanasya, *Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legieteme Portie, 4*, Media Iuris Vol. 3 No. 2 Juni 2020, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 *tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burglink Wetboek), Cet. 35, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Wawancara

Wawancara dengan Kepala BPN Bulukumba, Muhammad Yusri Andi Mapanyulle, Pada Tanggal 18 Januari 2022.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Andi Muh. Amin A.R, SH., Pada Tanggal 17 Januari 2022.

Wawancara dengan Notaris Bulukumba, Sukma Nurani, SH., Sp.N., Pada Tanggal 17 Januari 2022.